



# LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS HASIL PENGAWASAN KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD PENGAWAS TAHUN BUKU 2019



[www.koperasi-litbangdikbud.com](http://www.koperasi-litbangdikbud.com)



[kop.litbangdikbud@gmail.com](mailto:kop.litbangdikbud@gmail.com)

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Metode Pengawasan.....	2
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	4
2.1. Organisasi.....	4
2.2. Bidang Usaha Simpan Pinjam.....	5
2.3. Bidang Usaha Toko Koperasi .....	6
2.4. Bidang Usaha Jasa Fotokopi dan Tiket.....	7
2.5. Pengembangan Pengelolaan Koperasi .....	8
2.6. Hambatan yang Ditemui .....	10
2.7. Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik).....	11
BAB III KESIMPULAN.....	13
BAB IV REKOMENDASI.....	14
BAB VI PENUTUP .....	15
LAMPIRAN.....	16

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Realisasi Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Tahun 2018-2019 .....5  
Tabel 2. Realisasi SHU Toko Tahun 2018-2019 ..... 7  
Tabel 3. Realisasi SHU Fotokopi dan Travel Tahun 2018-2019.....8

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan Pengawasan dan Opname per Triwulan .....	3
Gambar 2. Penyerahan Laporan Keuangan untuk Diaudit oleh KKP .....	3
Gambar 3. Susunan organisasi Pengawas Koperasi Balitbang 2019-2020.....	5
Gambar 4. Layanan dan situasi Toko Koperasi .....	7
Gambar 5. Layanan Fotokopi dan Travel .....	8
Gambar 6. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Kinerja Koperasi .....	9
Gambar 7. Penyerahan Hasil Audit oleh KAP kepada Dewan Pengarah .....	12
Gambar 8. Penetapan Koperasi Terbaik tingkat Propinsi DKI Jakarta .....	13

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Auditor Independen.....	16
Lampiran 2. Rincian Laporan KAP .....	18

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Koperasi sebagai wadah kegiatan usaha bersama dalam rangka saling membantu diantara sesama anggota perlu dikelola secara profesional. Dalam pengelolaan tersebut perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada seluruh anggota Koperasi. Oleh karena itu, komitmen dari pengurus dalam menjalankan fungsi manajemen sangat diperlukan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi untuk mengontrol jalannya koperasi turut mewarnai apakah koperasi masih dalam kondisi sehat atau tidak. Dengan melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif dapat mengawal pengurus dalam menjalankan usaha sesuai dengan AD/ART Koperasi Balitbang yang dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggotanya dalam rapat anggota tahunan (RAT).

RAT Koperasi merupakan forum pertemuan, pengurus, pengawas dengan seluruh anggota dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi dalam mewujudkan demokrasi dengan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Di samping itu, RAT juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dan silaturahmi antara sesama anggota, pengurus, pengawas, pengarah, dan penasihat Koperasi Balitbang.

### 1.2. Landasan Hukum

- a. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam;
- d. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.

- e. Keputusan Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Nomor: 001/Kep/Koplitbang/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Periode 2019-2021.
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.
- g. Rencana Kerja dan RAPB Tahun Buku 2019.

### 1.3. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada Pengurus dalam mengelola usaha koperasi, menemukan masalah/hambatan yang hadapi, serta memberikan rekomendasi dalam upaya mengatasi hambatan/kendala dan pengembangan usaha koperasi.

Data dan informasi yang dicermati meliputi

- a. Realisasi Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang telah ditetapkan pada RAT tahun buku 2018;
- b. Masalah/hambatan dan upaya yang telah dilakukan masing-masing unit usaha tahun buku 2019;
- c. Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan koperasi.

### 1.4. Metode Pengawasan

Pengawasan Koperasi dilakukan melalui berbagai pertemuan secara berkala terkait dengan pelaksanaan program kerja setiap Bidang Usaha Koperasi (I, II, dan III) dengan cara melakukan pengawasan (*stock opname*). Selanjutnya, melakukan kunjungan langsung dan menindaklanjuti observasi dokumen/ barang, melakukan wawancara dan penandataan (*Check list*) serta memberikan masukan saran perbaikan atas hasil temuan dan diakhiri dengan penanda tanganan berita acara hasil pemeriksaan.

**Gambar 1. Kegiatan Pengawasan dan Opname per Triwulan**



Selain itu, sesuai arahan Pembina Koperasi dan amanah RAT Tahun Buku 2016 agar laporan keuangan koperasi akuntabel harus dilakukan audit oleh pihak eksternal, maka sejak tahun 2017 laporan keuangan dilakukan audit Kantor Akuntan Publik yang profesional.

**Gambar 2. Penyerahan Laporan Keuangan untuk Diaudit oleh KAP**





## BAB II HASIL PENGAWASAN

### 2.1. Organisasi

#### a. Keanggotaan

Berdasarkan data Kepegawaian Balitbang Kemendikbud pada posisi 31 Desember 2019, jumlah pegawai Balitbang sebanyak 441 orang dan yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi berjumlah 331 orang atau 75%. Masih terdapat 110 orang atau 25% yang belum masuk anggota Koperasi Balitbang (terutama dari Puslit Arkenas, 61 orang). Anggota Aktif per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat sebanyak 79 Orang (23,9%);
- 2) Puslitjakdikbud sebanyak 79 Orang (23,9%);
- 3) Puspendik sebanyak 89 Orang (26,9%)
- 4) Puskurbuk sebanyak 80 Orang (24,2%)
- 5) Non Balitbang sebanyak 4 Orang (1,2%)

#### b. Kepengurusan

Kepengurusan Koperasi Pegawai Balitbang periode 2019-2021 adalah hasil reformasi organisasi. Kepengurusan terbentuk berdasarkan pemilihan melalui formatur yang dipilih secara *online*, dan disepakati oleh anggota pada RAT Tahun Buku 2018. Restrukturisasi pengurus telah dilakukan, dari periode sebelumnya berjumlah 9 jabatan yang terdiri atas seorang Ketua, tiga Ketua Bidang, tiga Bendahara, serta dua orang Sekretaris, dirampingkan menjadi orang menjadi 5 orang. Kelima orang Pengurus tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

Struktur Pengawas juga dilakukan perampingan yang semula berjumlah 5 orang menjadi 3 orang. Ketiga orang Pengawas tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Hal tersebut mencerminkan upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Koperasi periode Kepengurusan Tahun 2019-2021.

**Gambar 3. Susunan organisasi Pengawas Koperasi Balitbang 2019-2020**

## 2.2. Bidang Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan bidang usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Balitbang tahun 2019 mempunyai target realisasi pendapatan sebesar Rp942.600.000,00, sedangkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2019 sebesar Rp1.016.937.618,00 atau 107,89% dari target RAPBK. Terpenuhinya target pada usaha bidang simpan pinjam ini antara lain didukung oleh meningkatnya jumlah dan besar pinjaman dibanding tahun sebelumnya.

Sementara biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp604.572.076,00 ditambah pajak sisa hasil usaha sebesar Rp49.944.360,13. Bidang simpan pinjam berhasil memperoleh SHU bersih sebesar Rp362.421.181,88.

**Tabel 1. Realisasi Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam Tahun 2018-2019**

TAHUN	RAPBK (Rp)	Realisasi (Rp) Jasa Simpan Pinjam	Capaian Realisasi (%)
2018	311.589.000,00	291.836.551,00	93,66%
2019	275.910.000,00	362.421.181,00	131,35%

lApabila dibandingkan tahun 2018, realisasi sisa hasil usaha bidang usaha simpan pinjam pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 24,19%.

Sementara itu, posisi modal persediaan per tanggal 31 Desember 2019, sbb: Kas/Bank : Rp1.132.460.607,63, terdiri atas:

- Uang Kas : Rp473.754.856,00
- Dana di Bank : Rp658.705.751,63

Piutang Koperasi tahun buku berjalan sebesar Rp7.364.340.847,00, dan jumlah piutang tersebut terdapat tunggakan/piutang macet yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.498.258,00.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pengawas adalah meminta pengurus untuk melakukan mediasi kepada yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja. Langkah yang diambil oleh pengurus memberikan teguran secara lisan dan tertulis, serta pembayaran tunggakan langsung dipotong melalui simpanan anggota dan tunjangan kinerja, namun masih belum mencukupi seluruhnya sehingga masih terdapat tunggakan.

Guna menghindari adanya tunggakan perlu diatur kembali antara lain:

- a. Besaran pinjaman dan tenor yang tidak terlalu lama sehingga modal dapat cepat berputar. Lama angsuran menyebabkan modal tunai berkurang, yang berdampak pada kesempatan anggota lain untuk memanfaatkan pinjaman terhambat.
- b. Bersetujuan pengajuan pinjaman tidak hanya mempertimbang kecukupan gaji tetapi juga perlu melihat jumlah simpanan anggota, yang dapat menutupi jumlah pinjaman tersebut sekiranya terjadi penunggakan.
- c. Pinjaman dengan jumlah di atas 100jt, diharuskan memberikan jaminan surat berharga seperti Sertifikat Rumah, BPKB Kendaraan, atau Taspen.
- d. Menambah jumlah simpanan wajib anggota untuk meningkatkan modal usaha simpan pinjam.

### **2.3. Bidang Usaha Toko Koperasi**

Kegiatan bidang usaha pertokoan Koperasi Pegawai Balitbang tahun 2019 mempunyai target realisasi pendapatan bersih sebesar Rp646.852.994,00, sedangkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2019 sebesar Rp592.790.436,00 atau 91.64% dari target RAPBK.

Sementara biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp343.868.813,00 ditambah pajak sisa hasil usaha sebesar Rp39.130.748,00. Usaha toko berhasil memperoleh SHU bersih sebesar RP209.790.875,00.

**Tabel 2. Realisasi SHU Toko Tahun 2018-2019**

Tahun	RAPBK (Rp)	Realisasi SHU (Rp)	Capaian Realisasi SHU (%)
2018	195.831.998,00	268.585.301,00	137,15%
2019	224.046.847,00	209.790.875,00	93,64%

Bila dibandingkan tahun 2018, realisasi sisa hasil usaha bidang toko pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -21,89%, hal ini disebabkan oleh kenaikan pengeluaran terutama sewa tempat usaha yang semula tahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00 melonjak menjadi Rp82.698.000,00. Hal tersebut dilakukan karena usaha travel yang tahun lalu turut memberikan pendapatan usaha, pada tahun buku 2019 tidak berjalan.

Di samping hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan melalui stok opname, dalam satu tahun ditemukan selisih stok dengan nilai sebesar Rp27.074.887,00. Berdasarkan hal tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penataan toko agar dilakukan tata letak kasir di depan pintu agar semua pembeli mudah melakukan transaksi pembayaran di kasir. Penjualan dan penempatan kue basah juga perlu itata kembali.

**Gambar 4. Layanan dan situasi Toko Koperasi**

#### 2.4. Bidang Usaha Jasa Fotokopi dan Tiket

Kegiatan bidang usaha Fotokopi dan tiket Koperasi Pegawai Balitbang tahun 2019 mempunyai target realisasi pendapatan bersih sebesar Rp246.500.000,00, sedangkan realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2019 hanya sebesar Rp130.040.700,00 atau 52,75% dari target RAPBK.

Sementara biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp53.250.000,00, ditambah pajak sisa hasil usaha sebesar Rp3.185.000,00. sehingga sisa hasil usaha bersih dari bidang usaha fotokopi dan tiket sebesar Rp73.608.700,00.

**Tabel 3. Realisasi SHU Fotokopi dan Travel Tahun 2018-2019**

Tahun	RAPBK (Rp)	Realisasi SHU (Rp)	Capaian Realisasi SHU (%)
2018	117.824.000,00	122.173.359,00	103,69%
2019	76.930.000,00	73.608.700,00	95,68%

Bila dibandingkan tahun 2018, realisasi sisa hasil usaha bidang Fotokopi dan tiket pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -39,75%. Hal ini dipengaruhi oleh usaha tiket yang hanya berlangsung selama dua bulan (Januari, Februari), karena kontrak kerjasama dengan mitra usaha ticketing PT Hindia Travel tidak diperpanjang, dan upaya kerjasama dengan mitra usaha ticketing yang baru hingga Desember 2019 belum terlaksana. Disarankan dicarikan mitra dengan sistem sewa tempat usaha dan pengembangan usaha lain seperti jasa pelaksanaan basar, jasa pembayaran token listrik, PAM, TV Kabel, dan jasa pengaduan seminar kitt.

**Gambar 5. Layanan Fotokopi dan Travel**

## 2.5. Pengembangan Pengelolaan Koperasi

Pengelolaan sistem administrasi sudah berbasis aplikasi, khususnya bidang usaha simpan pinjam dan usaha toko, sedangkan usaha jasa fotokopi dan tiket masih menggunakan pencatatan secara manual. Pelayanan Simpan Pinjam telah dikembangkan melalui aplikasi online, demikian juga dengan pelayanan usaha toko, telah dikembangkan took *online*. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui webstie: <http://www.koperasi-litbangdikbud.com> dan <http://toko.koperasi-litbangdikbud.com> dengan cara mengunduh aplikasi Koperasi Balitbang Kemendikbud berbasis android melalui playstore.

Upaya lainnya untuk meningkatkan kemudahan pembayaran non tunai, usaha toko telah menyediakan pelayanan transaksi non tunai yang bekerjasama dengan pihak BRI untuk transaksi melalui mesin *electronic data capture* (EDC).

Selain itu, dengan telah didaftarkannya koperasi menjadi wajib pajak yang dibuktikan dengan memiliki NPWP tersendiri, maka koperasi telah membayar pajak sejak tahun buku 2017.

Bidang simpan pinjam telah menerapkan manajemen risiko dengan cara penggunaan asuransi jiwa kepada seluruh anggota yang melakukan pinjaman. Kerja sama dilakukan dengan pihak asuransi jiwa syariah yang telah berlangsung sejak tahun buku 2017. Hal tersebut sebagai tindak lanjut hasil RAT tahun buku 2016 dan hasil Rapat Anggota Khusus tanggal 22 April 2017.

Kerjasama dengan unit yang lain seperti PKPRI, Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta, dan *Best Practice* dari Koperasi Koperasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan usaha.

Dalam upaya peningkatan kompetensi dan upaya pengkaderan calon pengurus dan calon pengawas koperasi, telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi (Cerdik Perkoperasian) dengan tema Peningkatan Pengawasan dan Kinerja Koperasi, dengan nara sumber dari PKPRI dan Pejabat Perkoperasian dari Kotamadya Jakarta Pusat.

#### **Gambar 6. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Kinerja Koperasi**



Selain itu, audit yang dilakukan oleh pihak eksternal melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah dilaksanakan sejak tahun buku 2017, sehingga tahun buku 2019



merupakan tahun ketiga pengawasan eksternal dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas laporan keuangan.

Perubahan Anggaran Dasar (AD) sudah disahkan oleh notaris tanggal 21 Februari 2018, Nomor 15 dengan Notaris Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn. namun belum diikuti dengan pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) berdasarkan AD yang baru tersebut. Untuk itu, pada Rapat Anggota tahun buku 2019 perlu ditetapkan ART tersebut sebagai alat kelengkapan organisasi.

## 2.6. Hambatan yang Ditemui

Berdasarkan hasil pengamatan, pemeriksaann dan wawancara dengan pengurus, dalam menjalankan usaha koperasi ditemui beberapa hambatan sebagai berikut.

- a. *Usaha simpan pinjam* mengalami kendala permodalan yang cukup setiap saat. Kebijakan RAT Tahun Buku 2017 yang meningkatkan jumlah pagu 200juta dan lama tenor jangka waktu 10 tahun, dengan jasa 0,7% per bulan, di satu sisi meningkatkan animo anggota untuk meminjam. Namun di sisi lain, dapat mengakibatkan kekurangan modal yang cepat bergulir untuk memenuhi pinjaman anggota berikutnya.
- b. *Modal usaha* belum digunakan secara maksimal terutama untuk pengembangan usaha lainnya. Jadi, pola pikir anggota sebaiknya tidak diarahkan pada pinjaman, akan tetapi pada memanfaatkan koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil transaksi dari anggota tersebut perlu diberikan penghargaan (*reward*) pada penghitungan SHU pada akhir tahun buku.
- c. *Disipilin Anggota*, dalam pembayaran angsuran pinjaman (menunggak pembayaran, tidak terpotong oleh Bendahara gaji) masih terjadi. Hal ini berdampak pada kesempatan anggota lain untuk memanfaatkan usaha peminjaman menjadi terkendala. Untuk itu, dihimbau kepada anggota yang masih memiliki tunggakan untuk segera melunasi tunggakan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2019, terhitung tunggakan sebesar Rp25.498.258,00, dari 12 (dua belas) orang Peminjam.
- d. *Peran serta Anggota*. Masih banyak anggota yang belum memanfaatkan secara maksimal usaha koperasi, terutama: (1) usaha toko untuk memenuhi kebutuhan

- sehari-hari baik pribadi maupun kantor (gula, kopi, pembersih, ATK, dll), (2) usaha ticketing, belum semua anggota menggunakannya untuk keperluan perjalanan dinas luar kota; (3) usaha jasa lain (pulsa, token listrik, dll) belum dapat berfungsi dan belum ada SDM yang khusus menanganinya.
- e. *Usaha travel* yang tidak berjalan sejak bulan Maret 2019, perlu dijajaki kembali untuk mencari mitra lain, sehingga tempat usaha travel dapat dioptimalkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna membayar sewa tempat usaha.
  - f. *Barang hilang* masih ditemukan dalam usaha toko. Hal tersebut kemungkinan disebabkan penataan penempatan barang yang kurang sesuai. Posisi kasir yang agak di dalam, sementara terdapat barang-barang yang posisinya di luar mengakibatkan kontrol terhadap pembeli agak kurang.
  - g. *Kondisi ruangan toko yang terbatas*, mengakibatkan kesulitan untuk memperbesar kapasitas dan pengembangan usaha, misalnya: gudang yang sempit, dan terjadinya antrian di kasir. Demikian juga dengan kondisi ruangan fotokopi dan layanan tiket perlu dilakukan penataan dan renovasi;
  - h. *Manajer Usaha yang professional*. Belum tersedia SDM yang kompeten dan memiliki penuh waktu serta fokus untuk mengelola dan mengembangkan usaha koperasi. Saat ini usaha koperasi dijalankan oleh pegawai Balitbang di sela-sela waktu kesibukannya sebagai ASN.

## **2.7. Pengawasan oleh Pihak Eksternal (Kantor Akuntan Publik)**

Sejak tahun 2017 dan dilanjutkan tahun 2018, kegiatan usaha koperasi telah diaudit oleh auditor professional dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Demikian halnya dengan tahun buku 2019, juga telah dilakukan audit oleh KAP yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut.

### *a. Opini*

1. Laporan keuangan koperasi dinilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
2. *Analisa Ratio Keuangan*
  - 1) Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek.



Komponen	2019	2018
Aset lancar (Rp)	9.003.666.818,-	8.673.091.572,-
Kewajiban lancar (Rp)	2.112.752.954	1.957.429.249,-
Likuiditas	4,2616	4,4309
(Aset lancar: Kewajiban lancar)	(426,16%)	(443,09 %)

2) Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang.

Komponen	2019	2018
Aset (Rp)	9.054.286.702	8.738.542.262,-
Hutang (Rp)	2.112.752.594	1.957.429.249,-
Solvabilitas	4,2855	4,4643
(Aset : Hutang)	(428,55%)	(446,43 %)

3) Rentabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Komponen	2019	2018
SHU tahun berjalan	645.820.757	634725891
Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan	6.295.713.351	6146387122
Rentabilitas		
(SHU tahun berjalan : Ekuitas sebelum SHU tahun berjalan)	0,1026 (10,26%)	0,1033 (10,33 %)

**Gambar 7. Penyerahan Hasil Audit oleh KAP kepada Dewan Pengarah**



Laporan hasil audit oleh kantor akuntan publik secara lengkap adalah seperti dalam lampiran.

**BAB III KESIMPULAN**

Hasil Pengawasan Koperasi Balitbang Tahun Buku 2019 menunjukkan bahwa Bidang Usaha I, II, dan III telah bekerja sesuai dengan program kerja yang ditetapkan. Pengelolaan usaha telah dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, ikut berkontribusi dalam membangun negara melalui pembayaran pajak, meningkatkan keamanan simpanan anggota dengan mengikutsertakan dalam asuransi, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga/unit usaha lain dalam mengembangkan usaha dan peningkatan layanan kepada anggota dan konsumen lainnya.

Upaya yang terus dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas serta kerja keras karyawan telah membuahkan hasil, dengan ditetapkannya Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud sebagai Koperasi Terbaik di DKI Jakarta oleh PKPRI pada tahun 2019.

**Gambar 8. Penetapan Koperasi Terbaik tingkat Propinsi DKI Jakarta**

Namun demikian beberapa kendala masih ditemui yakni anggota yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran pinjaman, modal usaha simpan pinjam tidak dapat tersedia setiap saat, masih banyak anggota yang belum memanfaatkan secara maksimal usaha koperasi terutama bidang usaha toko dan jasa lainnya, ruangan usaha toko dan fotokopi ticketing yang terbatas, serta belum tersedia SDM yang kompeten dan memiliki penuh waktu serta fokus untuk mengelola dan mengembangkan usaha koperasi

**BAB IV REKOMENDASI**

Berdasarkan pemeriksaan data yang ada dan perkembangan koperasi yang telah diperoleh Pengurus Koperasi Balitbang Kemendikbud Tahun Buku 2019, Pengawas merekomendasikan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT), bahwa Program Pengurus Koperasi Balitbang Kemendikbud perlu ditingkatkan dalam mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang proporsional pada tahun-tahun mendatang, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan modal koperasi dalam berbagai bentuk usaha diantaranya melalui kerjasama dengan unit usaha lain;
- 2) Seluruh anggota Koperasi agar disiplin dalam melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan advokasi dan menghimbau kepada seluruh anggota dan pengelola keuangan (PPK dan BP/BPP) khususnya di lingkungan unit kerja Balitbang untuk meningkatkan daya beli dengan memanfaatkan bidang usaha koperasi, serta kepada mereka diberikan penghargaan khusus dari SHU sesuai kontribusi dalam transaksi usaha koperasi;
- 4) Seluruh anggota Koperasi meningkatkan komitmennya untuk senantiasa berupaya menambah aset Koperasi, melalui: peningkatan simpanan wajib dan simpanan sukarela. Peningkatan simpanan wajib misalnya diatur menurut golongan kepangkatan, untuk Gol.II Rp200.000, Gol.III Rp300.000, dan Gol IV. Rp 400.000 per orang per bulan;
- 5) Mencari mitra untuk kerjasama bidang travel dalam upaya mengembangkan usaha kopersi;
- 6) Mengembangkan Jumlah Anggota Koperasi, dengan meningkatkan sosialisasikan kepada PNS khususnya di lingkungan Balitbang yang belum menjadi anggota Koperasi, maupun PPNPN sebagai anggota sukarela;
- 7) Pengembangan usaha jasa agar dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yang disepakati dalam forum RAT.

**BAB VI PENUTUP**

Koperasi Balitbang Kemendikbud sebagai unit usaha dan kerja sama diantara anggota memiliki peran penting bagi anggota dalam membantu para anggota untuk pemenuhan kebutuhan para anggota Koperasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan terpercaya, Koperasi Balitbang harus dikelola secara profesional, meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, dan memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggotanya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Jakarta, 20 Februari 2020

**PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD**

Ketua,

**Sidik Pranyoto, S.Kom., M.M.**

-----

Sekretaris,

Anggota,

**Nur Berlian V. Ali, STP., MSE.**

-----

**Ana Munifah, SE**

-----

**LAMPIRAN**



## Lampiran 1. Laporan Auditor Independen



**Salmon Sihombing**  
Registered Public Accountant  
License Number : 656/KM.1/2019

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00006/2.1282/AU.2/05/0287-2/1/1/2020

Pengurus  
**Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2019, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan**

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

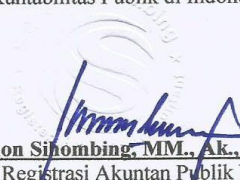
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Koperasi Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2020

  
**Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA., CPL., CLI**  
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0287  
Izin Usaha KAP No. 656/KM.1/2019

Office : Plaza Barat Lantai IX No. 10A ITC Cempaka Mas Jln. Letjen Suprpto – Jakarta 10640  
Workshop : Jln. Swadaya Raya No.8B RT.009 RW.001 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit – Jakarta Timur 13440  
Phone. 081288444432 – 02122857906 – 02122857910 – 02186612220 – 02142888628 Fax. 02142888627  
E-Mail : kap\_csg@yahoo.co.id

## Lampiran 2. Rincian Laporan KAP

**KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018  
( Dinyatakan Dalam Rupiah )

**21. ANALISA RATIO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keuangan KOPERASI PEGAWAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**a. LIKUIDITAS**

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar hutang jangka pendek.

Aset Lancar		Rp	9.003.666.818
Kewajiban Lancar		Rp	2.112.752.594
Likuiditas	=	9.003.666.818 :	2.112.752.594
	=	4,2616 :	1
	=	426,16 %	

**b. SOLVABILITAS**

Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang.

		Rp	9.054.286.702
		Rp	2.112.752.594
	=	9.054.286.702 :	2.112.752.594
	=	4,2855 :	1
	=	428,55 %	

**c. RENTABILITAS**

Rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan		Rp	645.820.757
Ekuitas sebelum SHU Tahun berjalan		Rp	6.295.713.351
Rentabilitas	=	645.820.757 :	6.295.713.351
	=	0,1026 :	1
	=	10,26 %	